

LKjIP TAHUN 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

AUTHOR NAME

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

NEW EDITION
2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

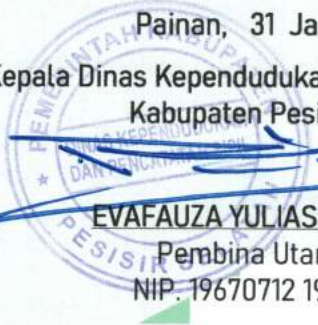
Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

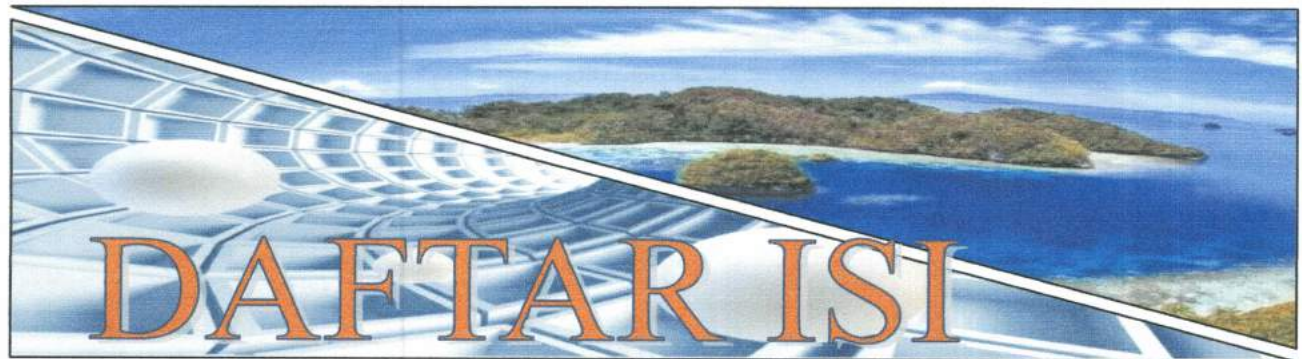
KATA PENGANTAR

Painan, 31 Januari 2021

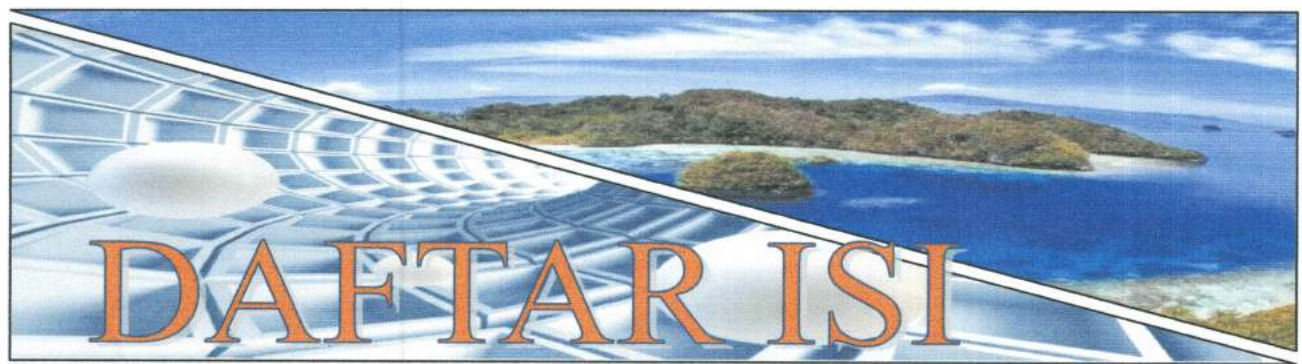
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19670712 199202 1 001

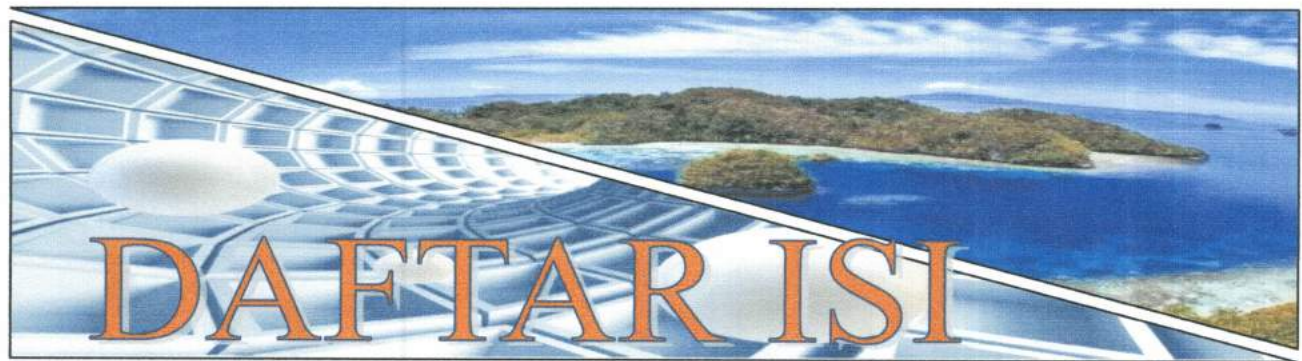


Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
1.3. Isu – Isu Strategis	5
1.4. Sumber Daya Manusia	7
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	11
1.6. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	16
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	17
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	19
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
2.4. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	25
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	27
3.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	50
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57



DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural	8
Tabel	1.2.	Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	9
Tabel	1.3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Tabel	1.3.	Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2020	11
Tabel	2.1.	Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016–2021	17
Tabel	2.2.	Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel	2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
Tabel	2.4.	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	21
Tabel	2.5.	Perjanjian Kinerja Tahunan 2020	22
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	23
Tabel	3.2.	Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2020	25
Tabel	3.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga	27
Tabel	3.4.	Kepemilikan KTP Elektronik	28
Tabel	3.5.	Kepemilikan Akta Kelahiran 0–18 Tahun	30
Tabel	3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	32
Tabel	3.7.	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	33
Tabel	3.8.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015–2020	34



Tabel	3.9.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2017 s.d. 2020	35
Tabel	3.10	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2	42
Tabel	3.11	Perbandingan Capaian Kinerja "Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan" Tahun 2018 s.d. 2020	45
Tabel	3.12	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	50
Tabel	3.13	Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis I	51
Tabel	3.14	Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis II	52
Tabel	3.15	Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020	53
Tabel	5.4.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat dengan indikatornya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang diukur dengan formula jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dibanding dengan Penduduk yang wajib memiliki dokumen kependudukan mendapat nilai capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 105,63%.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Skor Kepuasan Pengguna Pengguna Database Kependudukan mendapat capaian kinerja 100% dan Indikator Persentase Database Kependudukan yang Diakses Pengguna mendapat nilai capaian kinerja sebesar 202,79%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ke depan, sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan
2. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan dokumen administrasi kependudukan,
3. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Struktur Organisasi
3. Isu Strategis
4. Sumber Daya Manusia
5. Keadaan Sarana dan Prasarana
6. Sistematika LKj IP

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

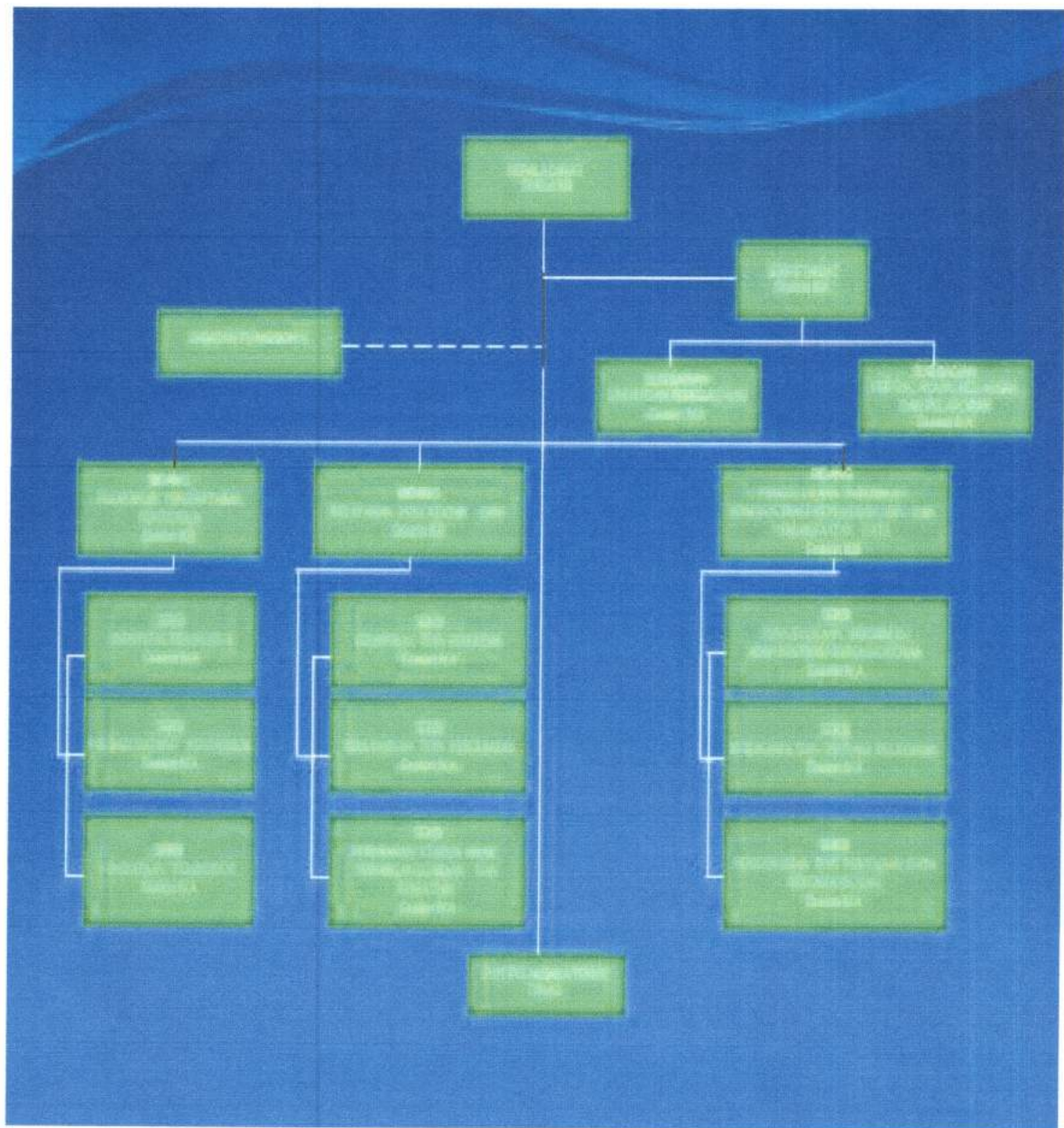
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tugas dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi :

- 1.2.1. Perumusan kebijakan teknis urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 1.2.2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
- 1.2.3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
- 1.2.4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 1.2.5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

- 1.2.5.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 1.2.5.2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 1.2.5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- 1.2.5.4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 1.2.5.5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 1.2.5.6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 1.2.5.7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain sebagai berikut :

- 1.3.1. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- 1.3.2. Pelayanan kependudukan go digital.
- 1.3.3. Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan
- 1.3.4. Dinamika penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan karakteristik kabupaten yang bersifat "terbuka dan tempat tujuan untuk berbagai kepentingan"



Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada :

- 0.000 59' - 20 28,6' Lintang Selatan,
- 1010 01" - 1010 30" Bujur Timur

dengan luas wilayah 5.749,89 Km².

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai Barat Propinsi Sumatera Barat berbatasan di :

- Sebelah Utara dengan Kota Padang,
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Provinsi Jambi, dan
- Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia.

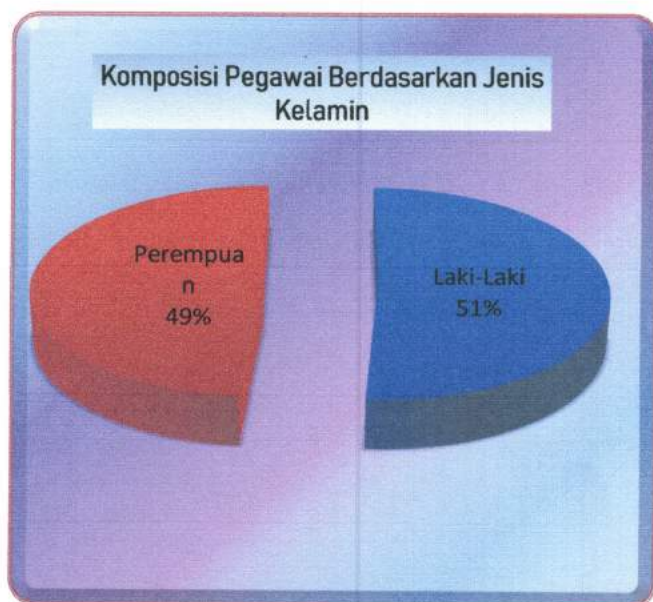
TOPOGRAFI DAN IKLIM

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 57 buah pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 230 C hingga 320 C disiang hari dan 20 C 280 C dimalam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan.

Kodisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan dewasa ini adalah sebagian besar lahan hutan yaitu 70,54% hutan lebat dan 13,37% hutan belukar, lahan sawah 6,07%, perkebunan 2,30% dan sisanya adalah perkampungan, kebun campuran dan kebun rakyat lainnya.

1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.



Pada akhir tahun 2020 terdapat 133 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 36 orang dan Tenaga Tidak Tetap (PTT) sebanyak 97 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 51% dan sisanya sebanyak

49% merupakan pegawai perempuan. Pegawai Laki laki 68 orang, dan wanita sebanyak 65 orang.

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 13 orang pejabat struktural dan 23 orang staf fungsional umum, dan 97 tenaga tidak tetap dengan komposisi 9,77% pejabat struktural dan 90,23% non struktural.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1.	Kepala Dinas	1	Ada
2.	Sekretaris	0	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang		
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	Ada
4.	Kepala Sub Bagian		
	• Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Ada
	• Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Ada
5.	Kepala Seksi		
	• Kepala Seksi Identitas Penduduk	1	Ada
	• Kepala Seksi Pendataan Penduduk	0	Tidak Ada
	• Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	1	Ada
	• Kepala Seksi Kelahiran	1	Ada
	• Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	0	Tidak Ada
	• Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	1	Ada
	• Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Ada
	• Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1	Ada
	• Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1	Ada
6.	Fungsional Umum	23	Ada
7.	Pegawai Tidak Tetap	97	Ada

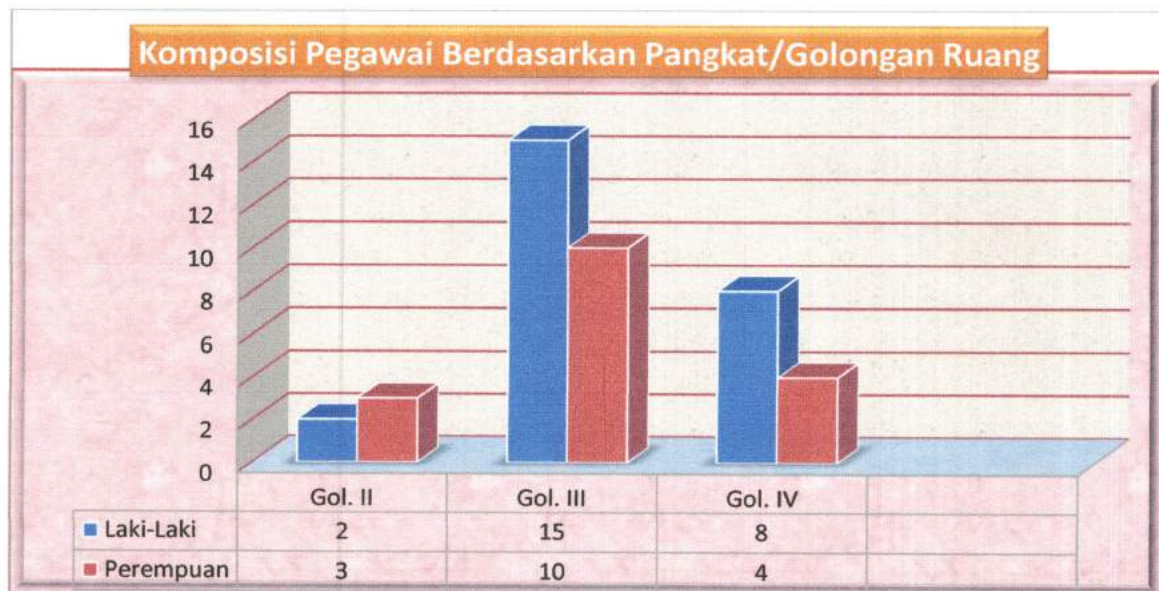
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2020

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dibanding perempuan. Sedangkan pada tingkat eselon untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan hampir sama dengan pegawai laki-laki.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.

Tabel 1.3.
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

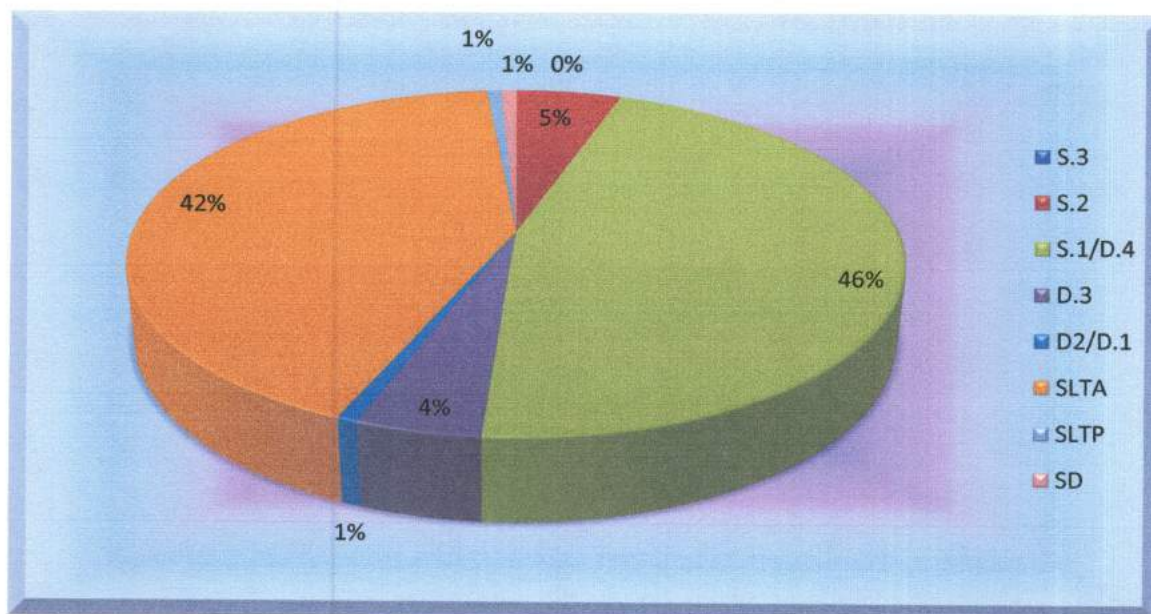
No.	Pangkat	Laki - Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0
2	Pembina Tk. I (IV/b)	0	1
3	Pembina (IV/a)	1	2
4	Penata Tk. I (III/d)	2	1
5	Penata (III/c)	6	4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	2
7	Penata Muda (III/a)	6	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1
9	Pengatur (II/c)	5	1
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	2
11	Pengatur Muda (II/a)	0	0
	Jumlah	19	17



Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S.1 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang atau sebesar 45,93%, kemudian SLTA sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang atau sebesar 42,22%. Selain itu, ASN dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut sebanyak 6 (tujuh) orang dan 6 (enam) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S.3	0	0
2.	S.2	7	5,20
3.	S.1/D.4	62	45,93
4.	D.3	6	4,43
5.	D.2/D.1	1	0,74
6.	SLTA	57	42,22
7.	SLTP	1	0,74
8.	SD	1	0,74
JUMLAH		135	100



1.5. Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2020

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Genset	15	-	15
2.	Pompa Air	2	-	2
3.	Mobil	3	-	3
4.	Sepeda Motor	20	-	20
5.	Sepeda	1	-	1
6.	Mesin Ketik	2	-	2
7.	Almari Besi	2	-	2
8.	Rak Besi Siku	51	-	51
9.	Rool Pack/ Rotary filling	4	-	4
10.	Rak Kayu	25	-	25
11.	Filling Cabinet	35	-	35
12.	Almari lereg kaca	4	-	4
13.	Almari kayu	10	-	10

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
14.	Whiteboard	1	-	1
15.	Mesin Presensi	3	-	3
16.	Layar OHP	1	-	1
17.	LCD Proyektor	1	-	1
18.	Kursi Komputer	10	-	10
19.	Kursi Tunggu	6	-	6
20.	Meja Komputer	7	-	7
21.	Kursi Tamu	3	-	3
22.	Meja Kerja	46	-	46
23.	Meja Knap	3	-	3
24.	Jam Dinding	8	-	8
25.	AC	15	-	15
26.	Exhouse Fan	2	-	2
27.	Televisi	4	-	4
28.	Sound System	1	-	1
29.	UPS PC	5	-	5
30.	Lambang Garuda	1	-	1
31.	Gambar Presiden, Wakil Presiden	2	-	2
32.	Tiang Bendera	1	-	1
33.	Monitor PC	21	-	21
34.	PC	45	-	45
35.	Laptop	11	-	11
36.	Scanner	17	-	17
37.	Server SIAK	1	-	1
38.	Sarana LAN	1	-	1
39.	Sarana LAN dengan modem	14	-	14
40.	Printer	133	-	133
41.	Meja Kerja 1 Biro	6	-	6
42.	UPS PC	32	-	32
43.	Kursi Sandaran Tinggi	3	-	3
44.	Kursi Sandaran Rendah	7	-	7
45.	Kursi rapat lipat	119	-	119
46.	Kursi rapat susun	5	-	5
47.	Kursi staf	43	-	43
48.	Camera Digital	29	-	29
49.	Adaptor Camera	15	-	15
50.	Tripod	14	-	14
51.	Pemotong KTP ELEKTRONIK	28	-	28

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
52.	Mesin Laminating	36	-	36
53.	Lamipacker	14	-	14
54.	Pesawat Telepon	10	-	10
55.	Kipas Angin	23	-	23
56.	Vertical Blind	1	-	1
57.	Karpet	1	-	1
58.	Bangunan Gedung	1	-	1
59.	Buku Perpustakaan	84	-	84
60.	Kursi Roda	1	-	1
61.	Trolly barang	1	-	1
62.	Toolkit	2	-	2
63.	Rak multiguna	7	-	7
64.	Alat semprot sprayer	1	-	1
65.	Media edukasi	2	-	2
66.	Papan informasi	1	-	1
67.	Kursi plastik	20	-	20
68.	Dehumedifier	1	-	1
69.	Tangga alumunium	3	-	3
70.	Tempat koran	1	-	1
71.	Tempat sampah	2	-	2
72.	Sekat meja	1	-	1
73.	Mesin faximile	1	-	1
74.	Thermometer tembak	3	-	3
75.	Thermo hygrometer	2	-	2
76.	HT	1	-	1

Sumber: Buku Inventaris Barang, 2020

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Indikator Kinerja Utama*
3. *Rencana Kinerja Tahunan*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2020*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan manifestasi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2016).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program

dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/029/Kpts/DKPS-PS/2020 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera	1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
		2. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar
	2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan
		2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial
	3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan mengembangkan nilai-nilai budaya "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK).	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan peran lembaga adat
		2. Lestarnya nilai adat dan budaya daerah

Visi	Misi	Sasaran Daerah
	4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
		2. Meningkatnya peran pengolahan dan pemasaran terhadap ekonomi daerah
		3. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Wisata Bahari di Sumatera Barat
	5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas dan peredaran obat terlarang	1. Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat
		2. Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2016 – 2021 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Bupati Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar. Hal ini ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menetapkan tujuan “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan serta didasarkan pada isu - isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Misi Yang Didukung	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan

2.2. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan suatu target kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan target telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020
1	2	3	4	5
Misi I Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	93,70%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Skor	9
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	%	75%

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari suatu sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,70%	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	9	
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	75,00%	

2.4. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,7%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	9
		2. Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	75,0%

Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Perubahan target Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan hanya pada Refocusing Anggaran untuk mendukung penanganan Covid_19 di Kabupaten Pesisir Selat

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2020.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	96% - 100%	Sangat Berhasil	
2.	81% - 95%	Berhasil	
3.	51% - 80%	Cukup Berhasil	
4.	<50%	Kurang Berhasil	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rumus Pengukuran Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah :



Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) tahun 2020 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020. Pencapaian IKU tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,70	98,59	105%	Sangat Berhasil	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	9	9	100%	Sangat Berhasil	
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	75,00	150,90	201,20%	Sangat Berhasil	

Pada tahun 2020, indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen mencapai 99,54 persen dari target sebesar 98,59 persen artinya kepemilikan dokumen administrasi

kependudukan sebagai indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan tercapai 98,59% dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atau tercapai 105 persen dari yang ditargetkan. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2020 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Pada indikator Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan mencapai realisasi sebesar 9 atau tingkat capaian sebesar 100 persen yang artinya target kinerja dapat dicapai dengan **Sangat Berhasil**.

Sedangkan pada indikator Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna mencapai realisasi kinerja sebesar 150,90 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 201,20 persen dengan prediket **Sangat Berhasil**.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran. Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Pada sasaran "Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator "persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan" diukur dengan menggunakan 3 (tiga) sub indikator yaitu :

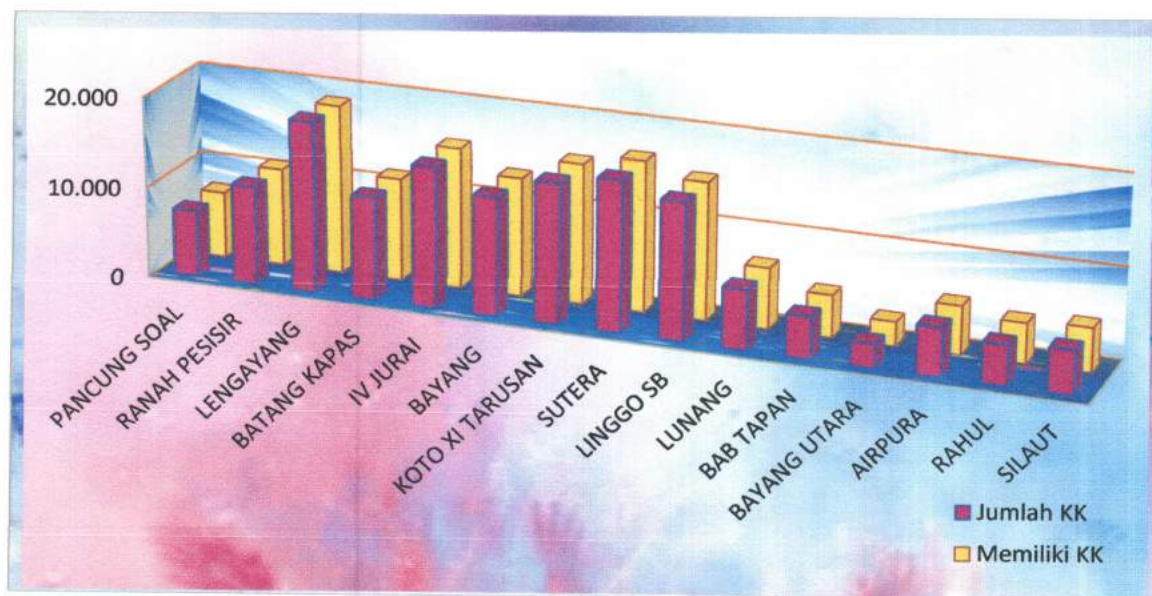
1. Persentase kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2. Persentase kepemilikan KTP_el
3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Hasil capaian kinerja dari masing – masing sub indikator kinerja pada Sasaran Strategis I dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Kepemilikan Kartu Keluarga Per 31 Desember 2020

NO	KECAMATAN	JML_KK	MILIK_KK	CAKUPAN KEPEMILIKAN (%)
1	PANCUNG SOAL	7.309	7.267	99,43
2	RANAH PESISIR	10.830	10.756	99,32
3	LENGAYANG	18.821	18.700	99,36
4	BATANG KAPAS	11.317	11.276	99,64
5	IV JURAI	15.486	15.481	99,97
6	BAYANG	13.070	13.038	99,76
7	KOTO XI TARUSAN	15.428	15.416	99,92
8	SUTERA	16.608	16.598	99,94
9	LINGGO SARI BAGANTI	15.115	15.114	99,99
10	LUNANG	6.623	6.603	99,70
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.590	4.585	99,89
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.644	2.630	99,47
13	AIRPURA	5.319	5.307	99,77
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.400	4.392	99,82
15	SILAUT	4.761	4.751	99,79
TOTAL KABUPATEN/KOTA		152.321	151.914	99,73

Sumber : Database Kependudukan Tahun 2020



Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Sub Indikator Kinerja I yaitu Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga didapati nilai capaian kinerja sebesar 99,73%.

Sedangkan pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis I sub indikator kinerja kedua yaitu kepemilikan KTP_el dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

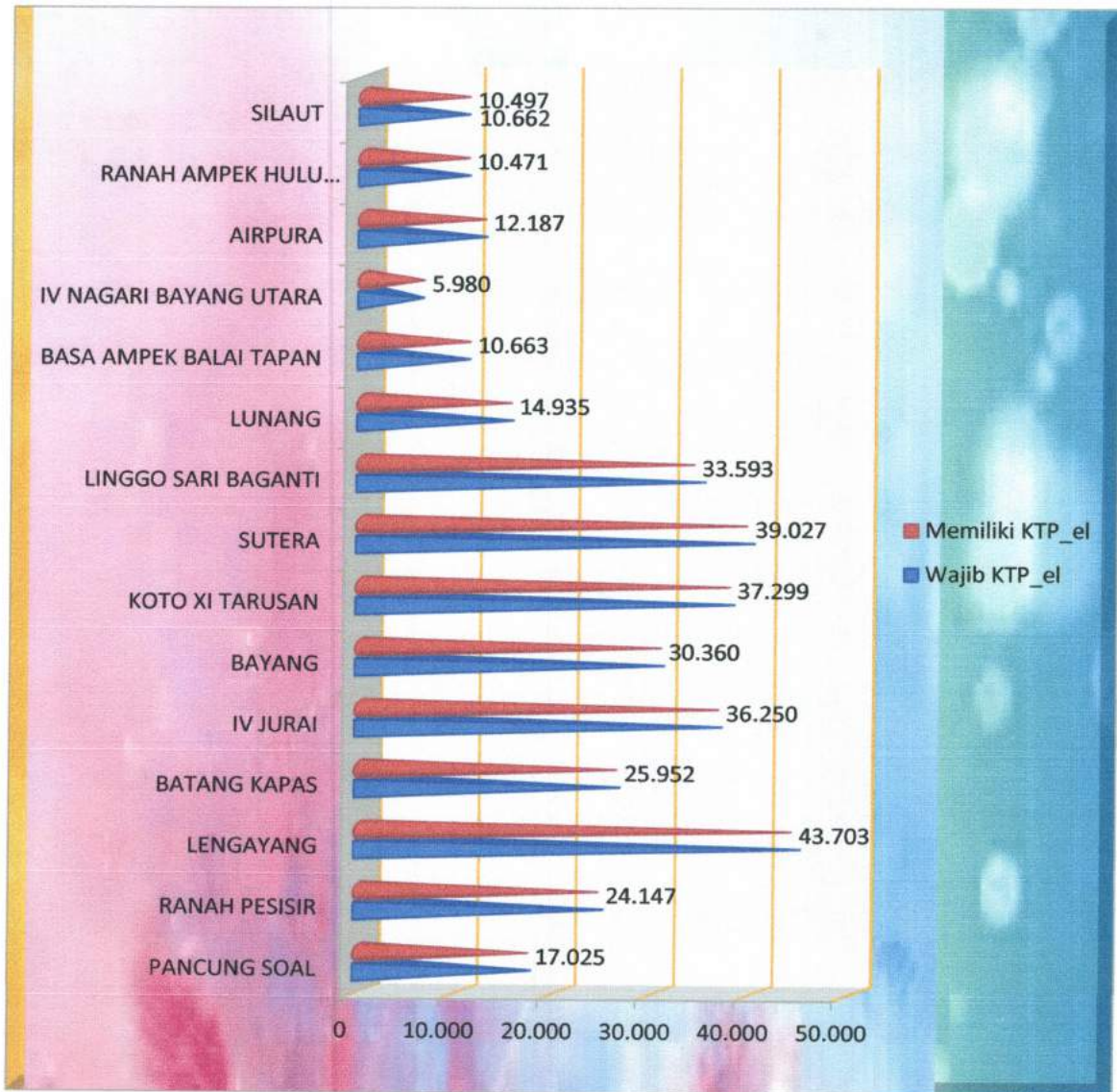
Tabel 3.4.
Kepemilikan KTP_el Per 31 Desember 2020

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP_EL		JUMLAH	MEMILIKI KTP_EL		JUMLAH	%
		LK	PR		LK	PR		
1	PANCUNG SOAL	8.790	8.734	17.524	8.472	8.553	17.025	97,15
2	RANAH PESISIR	12.092	12.750	24.842	11.633	12.514	24.147	97,20
3	LENGAYANG	22.154	22.725	44.879	21.407	22.296	43.703	97,38
4	BATANG KAPAS	12.957	13.500	26.457	12.617	13.335	25.952	98,09
5	IV JURAI	18.165	18.649	36.814	17.803	18.447	36.250	98,47
6	BAYANG	15.058	15.805	30.863	14.767	15.593	30.360	98,37
7	KOTO XI TARUSAN	18.949	19.037	37.986	18.507	18.792	37.299	98,19
8	SUTERA	19.960	20.027	39.987	19.361	19.666	39.027	97,60
9	LINGGO SARI BAGANTI	17.377	17.567	34.944	16.505	17.088	33.593	96,13
10	LUNANG	7.794	7.505	15.299	7.577	7.358	14.935	97,62
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	5.435	5.420	10.855	5.299	5.364	10.663	98,23
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.986	3.081	6.067	2.939	3.041	5.980	98,57
13	AIRPURA	6.286	6.212	12.498	6.080	6.107	12.187	97,51
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	5.393	5.336	10.729	5.232	5.239	10.471	97,60
15	SILAUT	5.482	5.180	10.662	5.393	5.104	10.497	98,45
TOTAL KABUPATEN/KOTA		178.878	181.528	360.406	173.592	178.497	352.089	97,69

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub indikator kinerja persentase kepemilikan KTP_el mendapatkan capaian kinerja sebesar 97,69%. Capaian kinerja sub indikator ke-2 (dua) dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik Kepemilikan KTP_el Tahun 2020



Sub indikator kinerja ketiga untuk sasaran strategis I “persentase kepemilikan dokumen kependudukan” yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun didapati capaian kinerjanya sebagai berikut :

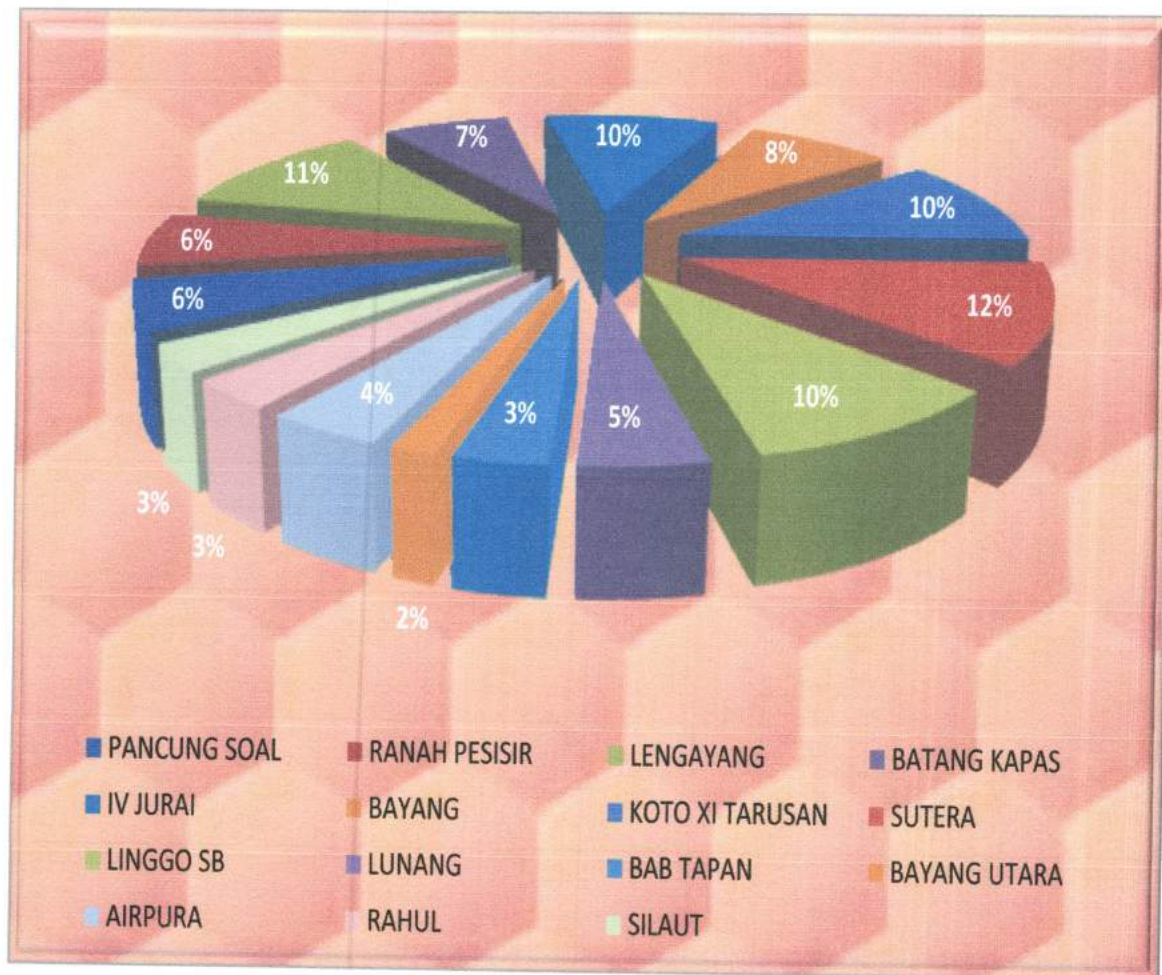
Tabel 3.5.
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
Per 31 Desember 2020

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN		JUMLAH	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PANCUNG SOAL	5.218	4.892	10.110	5.192	4.862	10.054	5,80%
2	RANAH PESISIR	5.613	5.230	10.843	5.556	5.189	10.745	6,20%
3	LENGAYANG	10.267	9.546	19.813	10.193	9.489	19.682	11,36%
4	BATANG KAPAS	6.482	5.857	12.339	6.461	5.844	12.305	7,10%
5	IV JURAI	8.903	8.136	17.039	8.879	8.111	16.990	9,80%
6	BAYANG	7.348	6.751	14.099	7.308	6.724	14.032	8,10%
7	KOTO XI TARUSAN	9.244	8.751	17.995	9.212	8.725	17.937	10,35%
8	SUTERA	10.288	9.573	19.861	10.270	9.556	19.826	11,44%
9	LINGGO SARI BAGANTI	8.911	8.176	17.087	8.780	8.059	16.839	9,72%
10	LUNANG	3.957	3.769	7.726	3.941	3.755	7.696	4,44%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.879	2.803	5.682	2.868	2.787	5.655	3,26%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.349	1.350	2.699	1.348	1.347	2.695	1,56%
13	AIRPURA	3.650	3.357	7.007	3.643	3.343	6.986	4,03%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3.006	2.679	5.685	3.001	2.667	5.668	3,27%
15	SILAUT	2.708	2.618	5.326	2.703	2.609	5.312	3,07%
TOTAL KABUPATEN/KOTA		89.823	83.488	173.311	89.355	83.067	172.422	99,49%

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub indikator persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun mendapatkan rata – rata capaian kinerja sebesar 99,49%. Capaian hasil kinerja sub indikator persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun



Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub-sub indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis I yaitu meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan indikator kinerja "persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan" mendapatkan rata – rata capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

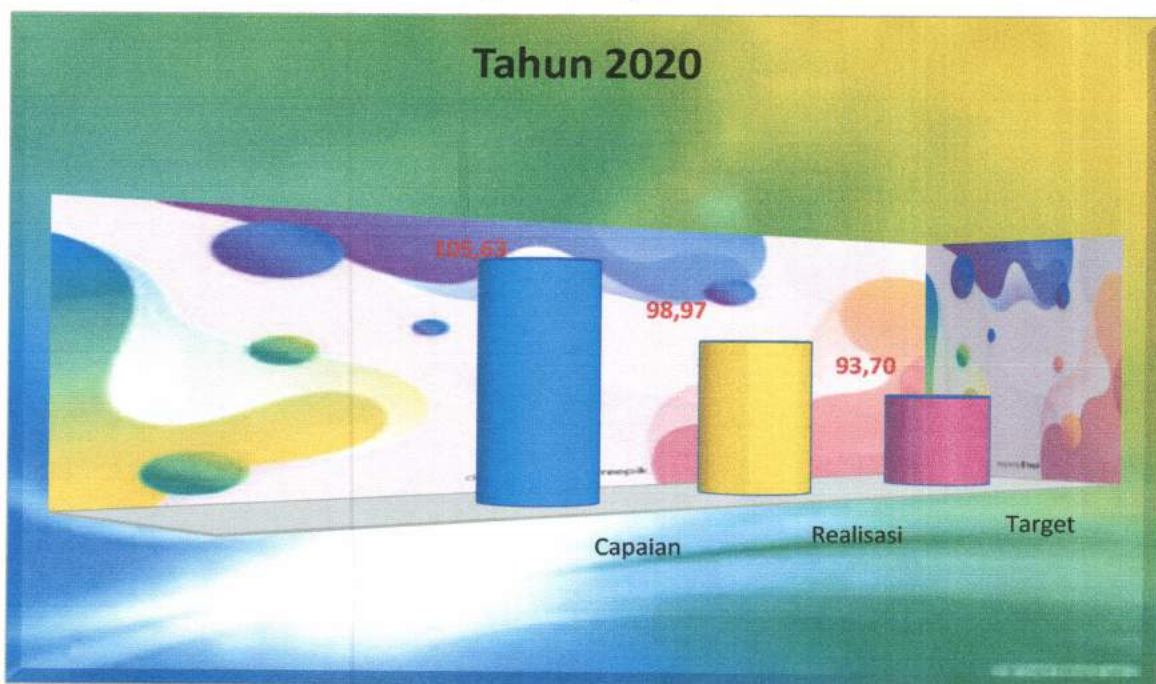
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Nilai Capaian Sub Indikator Kinerja	Nilai Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$	$\frac{151.914}{152.321} \times 100 = 99,73$	98,97
			Persentase Kepemilikan KTP_el	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Memiliki KTP_el}}{\text{Jumlah Wajib KTP_el}} \times 100$	$\frac{352.089}{360.406} \times 100 = 97,7$	
			Persentase Kepemilikan Akta	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Anak Usi 0-18 Tahun}} \times 100$	$\frac{172.422}{173.311} \times 100 = 99,5$	

Dari capaian kinerja sasaran tersebut diatas diperoleh hasil untuk kepemilikan Kartu Keluarga 99,73%, Kartu Tanda Penduduk 97,7%, dan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,5% sehingga realisasi kinerja untuk sasaran I dapat diperoleh dari rata – rata capaian dari sub indikator kinerja yakni $\{(99,73\% + 97,7\% + 99,5\%)/3\}$ adalah 98,97%. Predikat nilai capaian kinerja dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Perbandingan antara target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,70	98,97	105,63	Sangat Berhasil	

Grafik Capaian Kinerja Sasaran I

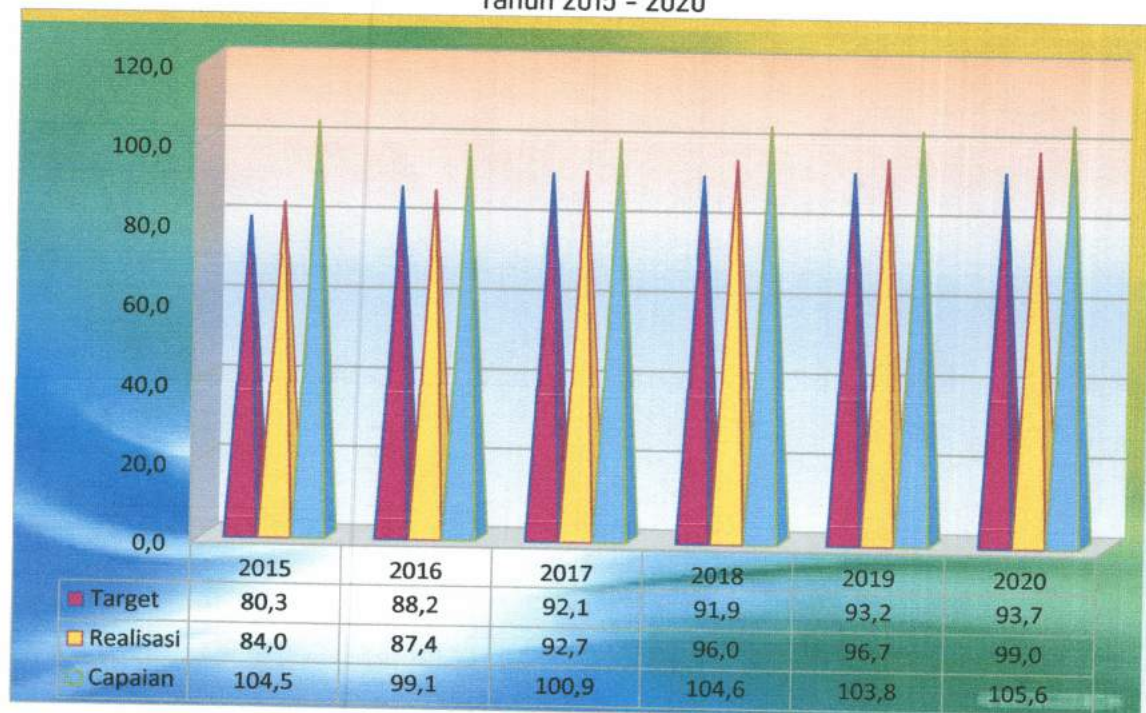


Sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja sub – sub indikator kinerja sasaran strategis 1 dari tahun 2015–2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Tabel Capaian Kinerja Sub Indikator Sasaran Strategis 1
Tahun 2015 - 2020

No.	Sub Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Kepemilikan KTP_el	66,0	66,5	100,7	85,0	75,8	89,1	86,0	92,2	107,2	83,7	90,2	107,7	90,0	95,2	105,8	93,0	97,7	105,0
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	95,0	96,6	101,7	95,2	96,3	101,1	96,5	95,4	98,9	97,0	99,0	102,1	95,0	97,4	102,5	93,5	99,7	106,7
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	80,0	89,0	111,3	84,3	90,2	107,0	93,7	90,5	96,6	95,0	98,9	104,1	94,6	97,6	103,2	94,6	99,5	105,2
RATA - RATA		80,3	84,0	104,5	88,2	87,4	99,1	92,1	92,7	100,9	91,9	96,0	104,6	93,2	96,7	103,8	93,7	99,0	105,6

Grafik Capaian Kinerja Sub Indikator Sasaran Strategis 1
Tahun 2015 - 2020



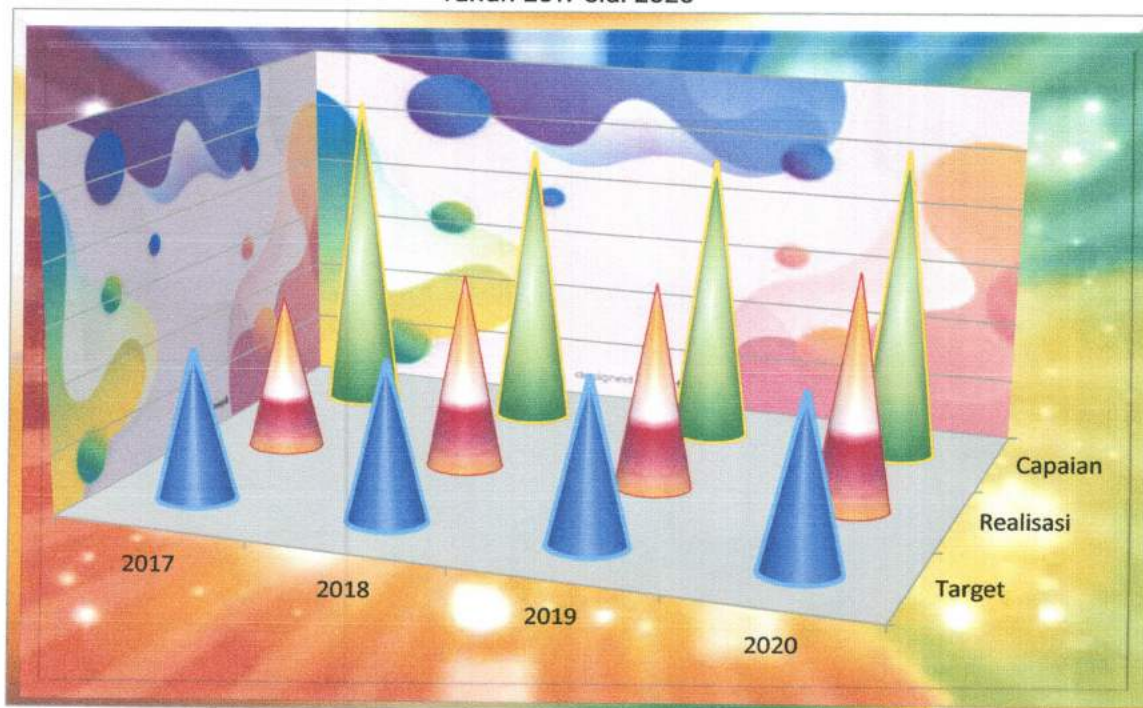
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Tahun 2017 s.d. 2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92,07%	92,70%	100,69%	92,80%	96,01%	103,46%	93,20%	96,72%	103,78%	93,70%	98,97%	105,62%

Grafik Capaian Kinerja Sasaran I
Tahun 2017 s.d. 2020



Analisis Keberhasilan pencapaian sasaran

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja sasaran I dimaksud adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat :

- 1) Adanya pandemic covid 19 menyebabkan terganggunya layanan adminduk secara tatap muka baik yang dilaksanakan di Dinas, Unit Kerja Layanan maupun kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat public dan sekolah.
- 2) Masih adanya anggapan di sebahagian masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sulit dan lama.
- 3) Adanya masyarakat yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan karena tinggal di luar Kabupaten Pesisir Selatan untuk bekerja, sekolah dan lain-lain

Faktor penunjang keberhasilan :

Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk/peningkatan pelayanan publik melalui upaya :

- 1) Perubahan layanan dengan pembatasan layanan tatap muka ke layanan daring baik melalui WhatsApp, Email maupun layanan adminduk online berbasis web.
- 2) Dengan layanan daring maka pelayanan di Unit Kerja Layanan Kecamatan ditiadakan karena dengan layanan daring masyarakat cukup mengajukan permohonan dari rumah tidak perlu datang ke loket- loket layanan baik di dinas maupun kecamatan.
- 3) Dalam pelayanan tatap muka yang terbatas diterapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid 19 di ruang layanan antara lain dengan pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun maupun handsanitizer, penggunaan masker, penyemprotan desinfektan dan pengaturan jarak antar pengunjung dan petugas.

- 4) Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu :



a. Melaksanakan Layanan inovasi BERPUTAR

(BERkeliling kamPUNG jempuT antAR)

Petugas UKL menggunakan kendaraan roda dua, setiap hari datang ke kampung-kampung mendatangi dan menjemput data

bagi keluarga yang sudah lama tidak melaporkan perubahan data kependudukan.

Dokumen Kependudukan yang baru akan diantar langsung ke rumah pendudukan tersebut.



- b. Program inovasi LADO KUTU (LAYanan DOKumen KependUdu TerpadU) tiga instansi (Dinas Dukcapil - RSUD - BPJS Kesehatan), loket LADO KUTU di RSUD

Layanan  inovasi ini khusus diberikan kepada pengunjung dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan dan rumah sakit lain yang sedang dirawat jalan atau rawat inap.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan loket pelayanan khusus 'LADO KUTU' yang sudah dilengkapi dengan perangkat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan. Setiap hari kerja 2 (dua) orang petugas akan melayani pengunjung dan pasien rumah sakit yang membutuhkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan perbaikan Data Kependudukan.



- c. Layanan inovasi TURUD BERDUKA (TURun ke RUMah Duka BERikan DokUmen KemAtian Kepala kampung sebagai Register Kampung melaporkan setiap peristiwa kematian ke Kantor UKL. Petugas UKL atau Register Kampung langsung hadir melayat ke rumah duka tempat peristiwa kematian. Pada saat pelaksanaan takziah atau kebiasaan menghitung hari terjadi kematian, petugas UKL atau Register Kampung langsung menyerahkan dokumen Akta Kematian kepada ahli waris atau keluarga dari penduduk yang meninggal.

- d. Layanan inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat perNIKAH-an) dengan Kantor 7 Kemenag dan KUA. Merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggerakkan fungsi Kepala Kampung sebagai Register Kampung.



Petugas UKL atau Register Kampung akan hadir pada acara pernikahan dan langsung memberikan Kartu Keluarga dan KTP elektronik yang telah berstatus kawin kepada pasangan nikah bersamaan dengan penyerahan Surat/Akta Nikah dari KUA.

- e. Layanan inovasi **SEHAT** (Semoga cEpat Se**HAT**).

Merupakan hasil kerjasama pelayanan dengan beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik kesehatan. Petugas Dinas atau UKL akan langsung mendatangi pasien yang sedang dirawat di kamar rawatan untuk melakukan perekaman KTP Elektronik dan menerbitkan KTP_el untuk pengurusan pelayanan seperti BPJS dan lainnya.





f. Layanan inovasi **SELAMAT LAHIR** (Setelah **LA**hir **Me**nd**A**pat **Ak**Ta **Ke****LA**HIRan)

Merupakan hasil kerjasama pelayanan dengan beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik bersalin. petugas Dinas atau UKL akan langsung memberikan dokumen KK, Akta Kelahiran dan KIA kepada ibu hamil yang baru melahirkan anak di Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik bersalin.

g. Layanan inovasi **MELISA** (**ME**layani **Pe**du**LI** Lanjut **US**i**A**)

Layanan inovasi ini khusus diberikan khusus kepada penduduk yang sudah lanjut usia. Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung datang ke rumah penduduk berusia lanjut. Pelayanan kepada penduduk lansia ini dilakukan dengan cara menjemput penduduk untuk dibawa ke kantor Unit Kerja Layanan dan kemudian diantar kembali ke rumahnya. Bagi penduduk lansia yang sudah sakit, pelayanan akan dilakukan langsung di rumah penduduk tersebut dengan membawa perangkat pelayanan.





h. Layanan inovasi PEDULI DISABILITAS (PElayanan Dokumen Kependudukan Peduli Disabilitas)

Layanan inovasi ini khusus diberikan kepada penduduk penyandang Disabilitas atau Penduduk dengan keterbatasan fisik dan/atau mental. Layanan inovasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung datang ke rumah penduduk disabilitas dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelayanan akan diberikan langsung di rumah penduduk tersebut dengan membawa perangkat pelayanan.

5) Layanan Inovasi Registrasi Mandiri Online

zukan akan diantar langsung oleh petugas UKL ke lembaga mitra kerjasama layanan

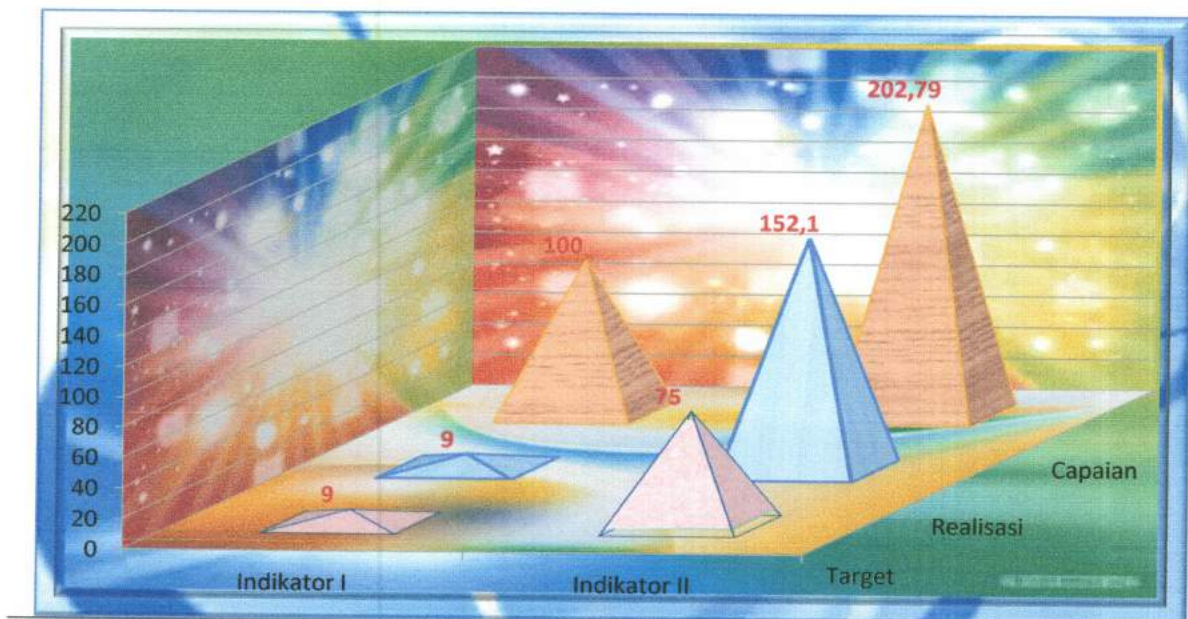
- 6) Dalam pelayanan daring, seluruh dokumen kependudukan (KK, Akta-akta catatan sipil, surat pindah penduduk) disampaikan ke pemohon dalam bentuk file dokumen melalui e-mail. Adapun untuk KTP – elektronik dan KIA disampaikan ke pemohon melalui jasa pos.

Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Realisasi capaian kinerja untuk indikator “ Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.10.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Nilai Capaian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Pola pengukuran menggunakan kuesioner	9	9	9	100	
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan yang diakses}}{\text{Jumlah data kependudukan}} \times 100$	$\frac{782.433}{514.444} \times 100 = 152,1$	75,0	152,1	202,79	



Pada sasaran "Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan" berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan memperoleh skor "9" dengan capaian kinerja sebesar 100% yang berarti indikator sasaran kinerja ini *sangat berhasil* dilaksanakan.

Penilaian terhadap indikator kinerja "skor kepuasan pengguna database kependudukan" ditujukan kepada Lembaga Pengguna Database Kependudukan yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 31 (tiga puluh satu) dimana 29 (dua puluh sembilan) OPD di Lingkupan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) Instansi vertikal dan 1 (satu) lembaga vertikal.

Dalam implementasinya, telah 13 (tiga belas) Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemanfaatan database kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Pesisir Selatan
6. Ruman Sakit Umum Daerah M. Zein Painan.

7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
9. Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
10. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
12. Nagari Siguntur Kecamatan Kot XI Tarusan
13. Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas

Skor kepuasan lembaga pengguna database kependudukan dilakukan dengan survey indeks kepuasan dengan menggunakan kuesioner. Untuk penarikan sampel/responden, maka ke-11 (sebelas) Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah tersebut dijadikan sebagai sampel/responden dalam survey ini.

Varibel/susunan pertanyaan dalam kuesioner ini terdiri dari 10 (sepuluh) pertanyaan yang merupakan gambaran dari tingkat kepuasan atas pelayanan pemanfaatan data serta pelayanan data dan dokumen kependudukan. Skala penilaian dari jawaban kuesioner ini adalah sebagai berikut :

SKALA	KRITERIA JAWABAN	SKOR PENILAIAN
1	TIDAK PUAS	6
2	KURANG PUAS	7
3	PUAS	8
4	SANGAT PUAS	9

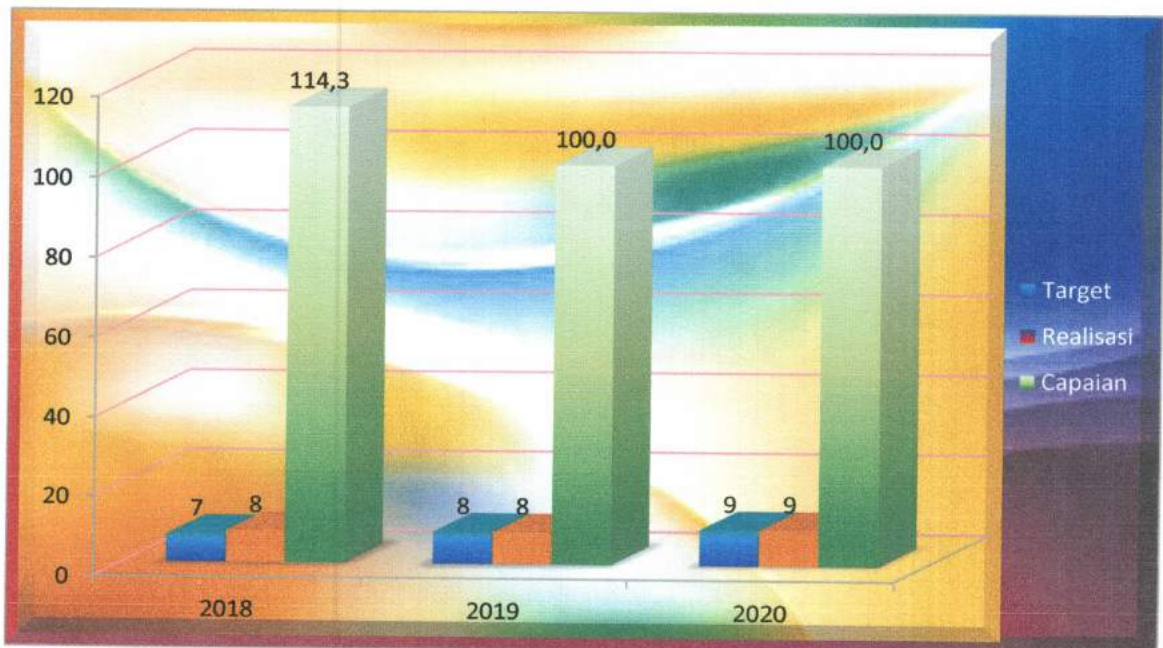
Metode Pengolahan hasil survey ini menggunakan perumusan nilai setiap pertanyaan sesuai dengan skala yang telah ditentukan, dengan penarikan nilai total dan hasil dari tiap – tiap responden sesuai batasan – batasan yang ditentukan (terlampir).

Perbandingan capaian kinerja sub indikator “Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan” tahun 2018 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11.
Perbandingan Capaian Kinerja “Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan” Tahun 2018 s.d. 2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	7	8	114,3%	8	8	100,0%	9	9	100,0%

Grafik Skor Kepuasan Lembaga Pengguna



Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pengguna "Sangat Puas" dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemberian data kependudukan yang dibutuhkan oleh Lembaga Pengguna. Berikut grafik Skor Pengguna Database Kependudukan

Pada indikator kedua sasaran "Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan" yaitu Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Lembaga Pengguna pada akhir Desember 2020 mendapat nilai realisasi kinerja sebesar 152,1 dengan capaian kinerja sebesar 202,79%. Hal ini berarti bahwa indikator kinerja ini telah berjalan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan kata lain capaian kinerja mencapai predikat "Sangat Berhasil". Berikut Jumlah Data Warehouse Kependudukan Yang Diakses Lembaga Pengguna selama tahun 2020 :

No.	Bulan	Lembaga Pengguna	Permintaan Data	Jumlah Data Diakses
1.	Februari	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemadanan data kependudukan by name by address bagi Penerima Manfaat JKN-KIS Sumber Pembiayaan APBD	40.760 Data
2.	Februari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data penduduk pemilih potensial per kecamatan khusus nagari yang akan melaksanakan Pilwana 2020	46.656 Data
3.	April	Dinas Perikanan dan Kelautan	Data penduduk perkecamatan berdasarkan jenis pekerjaan Nelayan	11.810 Data
4.	Mei	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data penduduk 19 nagari yang akan melaksanakan Pilwana 2020	46.136 Data

No.	Bulan	Lembaga Pengguna	Permintaan Data	Jumlah Data Diakses
5.	Juni	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Pesisir Selatan	Data penduduk meninggal yang tercatat pada Database Dukcapil per 24-09-2019 s.d. 24-02-2020	4.900 Data
6.	Juli	BPJS Kesehatan	Penyandingan data peserta JKN-KIS (NIK/Nomor KK Kosong) dengan Data Kependudukan	5.485 Data
7.	Juli	Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan	Data Buku Induk Kependudukan	3.509 Data
8.	Juli	Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	Data Buku Induk Kependudukan	12.135 Data
9.	Juli	Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan	Verifikasi data penduduk by name by address bagi anak yatim penerima Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	1.271 Data
10.	Juli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemadanan data penduduk by name by address bagi penerima manfaat JKN-KIS Pembiayaan APBD (Aktif Layanan)	34.943 Data
11.	Juli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemadanan data penduduk by name by address bagi penerima manfaat JKN-KIS Pembiayaan APBD (Aktif Layanan)	25.497 Data
12.	September	BPJS Kesehatan	Penyandingan data peserta tidak padan (NIK sama, nama beda) dengan data kependudukan	13.643 Data
13.	September	BPJS Kesehatan	Penyandingan data peserta tidak padan (NIK sama, nama sama) dengan data kependudukan	5.201 Data

No.	Bulan	Lembaga Pengguna	Permintaan Data	Jumlah Data Diakses
14.	November	Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Data penduduk pindah antar nagari, kecamatan dan keluar kabupaten dan penduduk dating antar nagari, kecamatan dan dari luar kabupaten sampai dengan November 2020	16.915 Data
15.	November	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data penduduk Pesisir Selatan by NIK by name by address (BNBNBA) Tahun 2020 untuk database Aplikasi Sinar sebagai data dasar pelayanan di Nagari	513.572 Data
JUMLAH TOTAL				782.433 Data

Tercapainya target kinerja pada indikator Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Lembaga disebabkan oleh beberapa faktor keberhasilan berikut ini :

1. Untuk meningkatkan jumlah database yang diakses, akan dibangun sistem koneksi antara sistem lembaga pengguna dengan sistem database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menggiatkan kegiatan sosialisasi tentang manfaat penggunaan database kependudukan bagi lembaga pengguna dalam membantu kinerja kegiatan masing – masing lembaga pengguna.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan database kependudukan agar pelayanan kepada lembaga pengguna sesuai dengan standar pelayanan.

4. Secara kontiniu melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan hambatan – hambatan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Data Warehouse yang ada pada Lembaga Pengguna/OPD belum dapat diintegrasikan ke sistem Datar Warehouse Pusat dan jaringan komunikasi data yang tersedia belum maksimal sehingga mengakibatkan Lembaga Pengguna/OPD tidak dapat mengakses data kependudukan secara online. Untuk memenuhi kebutuhan lembaga pengguna akan database kependudukan dilakukan secara manual.
2. Kerahasiaan data penduduk dapat bocor karena Lembaga Pengguna/OPD diberikan User Id dan Password untuk mengakses data kependudukan, sehingga User Id dan Password lembaga pengguna direset secara berkala.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 sejumlah Rp. 3.723.600.700,- yang terealisasi sejumlah Rp. 3.716.229.670,- atau terealisasi 99,80 %, yang bersumber dari

dana APBD Tahun 2020 yang termuat dalam 4 Program dan 29 kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah berjumlah Rp. 3.437.931.727,0 yang terealisasi berjumlah Rp. 3.341.057.861,- atau sebesar 97,18%

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2020, Adapun rincian anggaran dan realisasinya keadaan per-31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak Langsung	3.437.931.727	3.341.057.861	97,2%
II	Belanja Langsung	3.723.600.700	3.716.229.670	99,8%
JUMLAH TOTAL		7.161.532.427	7.057.287.531	98,5%

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13.

Program Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	9.250.000	9.247.500	100,0%
Jumlah I		9.250.000	9.247.500	100,0%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.600.000	35.600.000	100,0%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61.048.000	61.048.000	100,0%
Jumlah II		35.600.000	35.600.000	100,0%
III	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e_KTP	14.187.824	14.187.824	100,0%
2	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	10.110.750	10.110.750	100,0%
3	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	16.858.500	16.858.500	100,0%
4	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	13.429.300	13.429.300	100,0%
5	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	14.117.250	14.117.250	100,0%
6	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	1.823.630.000	1.823.127.392	100,0%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
7	Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)	12.179.750	12.179.750	100,0%
8	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian	35.287.000	35.236.400	99,9%
9	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai	14.939.800	14.939.800	100,0%
10	Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital	21.423.000	21.423.000	100,0%
11	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker	1.239.800.680	1.238.250.716	99,9%
Jumlah III		3.215.963.857	3.213.860.686	99,9%
Jumlah Total		3.260.813.857	3.258.708.186	99,9%

Tabel 3.14.

Program Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran II

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Program Penataan Adminstrasi Kependudukan			
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	12.249.700	12.249.700	100,0%
2	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	32.355.800	32.355.800	100,0%
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	10.870.000	10.870.000	100,0%
Jumlah Total		55.475.500	55.475.500	100,0%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran untuk semua kegiatan yang mendukung sasaran strategis berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Untuk perbandingan antara capaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.
Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan 2020

Kinerja					Keuangan			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu Dana	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,70%	98,97%	105,62%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.250.000	9.247.500	99,97%
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.600.000	35.600.000	100,00%
					Penataan Administrasi Kependudukan	3.215.963.857	3.213.860.686	99,93%
Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	9	9	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55.475.500	55.475.500	100,00%
	Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	75,0%	152,09%	202,8%	Penataan Administrasi Kependudukan			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 mempunyai akuntabilitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian kinerja yang melebihi target keuangan.

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

- 1. Kesimpulan*
- 2. Saran*

4.1. Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mengemban tugas dibidang Administrasi Kependudukan maka hal ini melekat erat dengan pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan mengenai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dirasakan manfaat penting dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasannya sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugasannya dengan berdasar pada 2 (dua) Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 3 indikator yaitu :

1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target 93,70% pada akhir Desember 2020 terealisasi sebesar 98,97%.

2. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan dengan target "8", terealisasi sebesar "9".
3. Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna dengan target 65,0% pada akhir Desember 2020 telah terealisasi sebesar 151,1%.

Dari apa yang disampaikan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil". Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 daya serap anggaran mencapai 99,9%.

4.2. Saran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "PELAYANAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT".

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/ operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kepala Daerah dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan . Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan :

1. Memperluas sosialisasi sistem layanan online yang telah diterapkan meningkatkan keamanan system pelayanan online dengan menghapus system permohonan melalui WA dan beralih sepenuhnya menggunakan system layanan melalui jogja smart service (jss) dan aplikasi berbasis web.

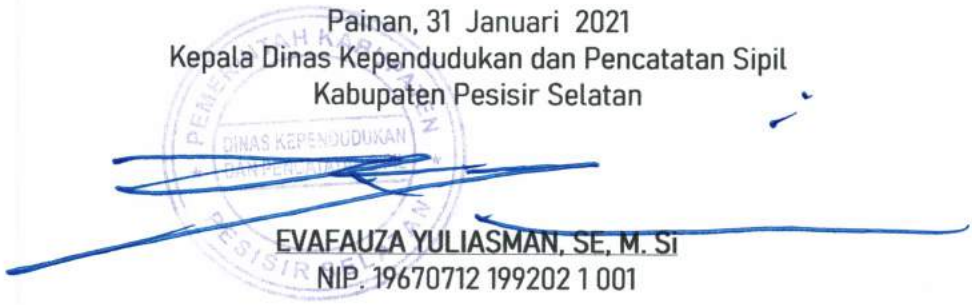
2. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait lainnya seperti Klinik Bersalin, Bidan, Rumah Sakit Swasta, KUA, dll.
3. Mengajukan permohonan penambahan SDM ke BKPSDM yang semakin berkurang akibat mutasi, promosi maupun purna tugas.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, aman dan mudah dijangkau dengan fasilitas modern dengan mengusulkan pembangunan gedung baru ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;

Prasarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika, birokrasi pemerintahan, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 31 Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. SI
NIP. 19670712 199202 1 001

**KEPEMILIKAN KTP_el PENDUDUK KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER-31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP_EL		JUMLAH	MEMILIKI KTP_EL		JUMLAH	%
		LK	PR		LK	PR		
1	PANCUNG SOAL	8.790	8.734	17.524	8.472	8.553	17.025	97,15
2	RANAH PESISIR	12.092	12.750	24.842	11.633	12.514	24.147	97,20
3	LENGAYANG	22.154	22.725	44.879	21.407	22.296	43.703	97,38
4	BATANG KAPAS	12.957	13.500	26.457	12.617	13.335	25.952	98,09
5	IV JURAI	18.165	18.649	36.814	17.803	18.447	36.250	98,47
6	BAYANG	15.058	15.805	30.863	14.767	15.593	30.360	98,37
7	KOTO XI TARUSAN	18.949	19.037	37.986	18.507	18.792	37.299	98,19
8	SUTERA	19.960	20.027	39.987	19.361	19.666	39.027	97,60
9	LINGGO SARI BAGANTI	17.377	17.567	34.944	16.505	17.088	33.593	96,13
10	LUNANG	7.794	7.505	15.299	7.577	7.358	14.935	97,62
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	5.435	5.420	10.855	5.299	5.364	10.663	98,23
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.986	3.081	6.067	2.939	3.041	5.980	98,57
13	AIRPURA	6.286	6.212	12.498	6.080	6.107	12.187	97,51
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	5.393	5.336	10.729	5.232	5.239	10.471	97,60
15	SILAUT	5.482	5.180	10.662	5.393	5.104	10.497	98,45
TOTAL KABUPATEN/KOTA		178.878	181.528	360.406	173.592	178.497	352.089	97,69

Painan, 31 Januari 2021

Kepala Dinas,

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

**KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA
PER-KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER-31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	JML_KK	MILIK_KK	CAKUPAN KEPEMILIKAN (%)
1	PANCUNG SOAL	7.309	7.267	99,43
2	RANAH PESISIR	10.830	10.756	99,32
3	LENGAYANG	18.821	18.700	99,36
4	BATANG KAPAS	11.317	11.276	99,64
5	IV JURAI	15.486	15.481	99,97
6	BAYANG	13.070	13.038	99,76
7	KOTO XI TARUSAN	15.428	15.416	99,92
8	SUTERA	16.608	16.598	99,94
9	LINGGO SARI BAGANTI	15.115	15.114	99,99
10	LUNANG	6.623	6.603	99,70
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.590	4.585	99,89
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.644	2.630	99,47
13	AIRPURA	5.319	5.307	99,77
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.400	4.392	99,82
15	SILAUT	4.761	4.751	99,79
TOTAL KABUPATEN/KOTA		152.321	151.914	99,73

Painan, 31 Januari 2021

Kepala Dinas,

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si

NIP. 19670712 199202 1 001

**KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN
PENDUDUK KABUPATEN PESIRIS SELATAN
PER-31 DESEMBER 2020**

PER-31 DESEMBER 2020

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN		JUMLAH	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PANCUNG SOAL	5.218	4.892	10.110	5.192	4.862	10.054	5,80%
2	RANAH PESISIR	5.613	5.230	10.843	5.556	5.189	10.745	6,20%
3	LENGAYANG	10.267	9.546	19.813	10.193	9.489	19.682	11,36%
4	BATANG KAPAS	6.482	5.857	12.339	6.461	5.844	12.305	7,10%
5	IV JURAI	8.903	8.136	17.039	8.879	8.111	16.990	9,80%
6	BAYANG	7.348	6.751	14.099	7.308	6.724	14.032	8,10%
7	KOTO XI TARUSAN	9.244	8.751	17.995	9.212	8.725	17.937	10,35%
8	SUTERA	10.288	9.573	19.861	10.270	9.556	19.826	11,44%
9	LINGGO SARI BAGANTI	8.911	8.176	17.087	8.780	8.059	16.839	9,72%
10	LUNANG	3.957	3.769	7.726	3.941	3.755	7.696	4,44%
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.879	2.803	5.682	2.868	2.787	5.655	3,26%
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.349	1.350	2.699	1.348	1.347	2.695	1,56%
13	AIRPURA	3.650	3.357	7.007	3.643	3.343	6.986	4,03%
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3.006	2.679	5.685	3.001	2.667	5.668	3,27%
15	SILAUT	2.708	2.618	5.326	2.703	2.609	5.312	3,07%
TOTAL KABUPATEN/KOTA		89.823	83.488	173.311	89.355	83.067	172.422	99,49%

Painan, 31 Januari 2021

Kepala Dinas,

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si

NIP. 19670712 199202 1 001

**REKAPITULASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA / OPD
TAHUN 2020**

NO.	BULAN	LEMBAGA PENGGUNA / OPD	PERMINTAAN DATA	JUMLAH DATA DIAKSES	KETERANGAN
1.	Februari	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemadanan Data Kependudukan <i>By Name By Address</i> bagi Penerima Manfaat JKN-KIS Sumber Pembiayaan APBD	40.760 Data	Data Dasar dari BPJS Kesehatan
2.	Februari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Penduduk Pemilih Potensial Per Kecamatan Khusus Nagari yang akan melaksanakan PILWANA 2020	46.656 Data	Sumber Data Pelayanan
3.	April	Dinas Perikanan dan Kelautan	Data Penduduk Perkecamatan berdasarkan Jenis Pekerjaan Nelayan	11.810 Data	
4.	Mei	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Penduduk 19 Nagari yang akan melaksanakan PILWANA 2020	46.136 Data	Sumber Data Pelayanan
5.	Juni	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Pesisir Selatan	Data Penduduk Meninggal yang tercatat pada Database Dukcapil per 24-09-2019 s/d 24-02-2020	4.900 Data	Sumber Data Pelayanan
6.	Juli	BPJS Kesehatan	Penyandingan Data Peserta JKN-KIS (NIK / Nomor KK Kosong) dengan Data Kependudukan	5.485 Data	
7.	Juli	Nagari Siguntur Kec. Koto XI Tarusan	Data Buku Induk Kependudukan	3.509 Data	
8.	Juli	Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas	Data Buku Induk Kependudukan	12.135 Data	
9.	Juli	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan	Verifikasi Data Penduduk <i>By Name By Address</i> bagi Anak Yatim penerima Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	1.271 Data	
10.	Juli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemadanan Data Kependudukan <i>By Name By Address</i> bagi Penerima Manfaat JKN-KIS Sumber Pembiayaan APBD (Aktif Layanan)	34.943 Data	
11.	Juli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemadanan Data Kependudukan <i>By Name By Address</i> bagi Penerima Manfaat JKN-KIS Sumber Pembiayaan APBD (Tidak Aktif Layanan)	25.497 Data	
12.	September	BPJS Kesehatan	Penyandingan Data Peserta Tidak Padan (NIK Sama, NAMA tidak sama) dengan data Kependudukan	13.643 Data	
13.	September	BPJS Kesehatan	Penyandingan Data Peserta Sepadan (NIK Sama, NAMA sama) dengan data Kependudukan	5.201 Data	
14.	November	Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Data Penduduk Pindah Antar Nagari, Kecamatan dan keluar Kabupaten dan Penduduk Datang Antar Nagari, Kecamatan dan Dari Luar Kabupaten s/d November 2020	16.915 Data	
15.	November	Dinas Kominfo	Data Penduduk Pesisir Selatan By NIK By Name By Address (BNBNBA) Tahun 2020 untuk database Aplikasi Sinar sebagai data dasar pelayanan di Nagari	513,572 Data	

Painan, 31 Januari 2021

Kepala Dinas,

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. SI

NIP. 19670712 199202 1 001

HASIL SURVEY
KEPUASAN LEMBAGA / PERANGKAT DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. JUMLAH SAMPEL / RESPONDEN

- Responden dalam survey ini adalah Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan serta Pelayanan Data dan Dokumen Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Lembaga / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data terdapat 29 (dua puluh sembilan) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerjasama Pelayanan Data dan Dokumen Kependudukan terdapat 1 OPD, 1 Instansi Vertikal dan 1 Lembaga Vertikal.
- Dalam implementasinya, baru 11 Lembaga / Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemanfaatan data kependudukan dan kerjasama pelayanan data dan dokumen kependudukan yang dikelola oleh Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan dengan metode penyandingan, penyelarasan dan penginputan database secara manual, yaitu :
 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika,
 3. Sekretariat Daerah (Bagia Kesra),
 4. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Pesisir Selatan,
 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pesisir Selatan,
 6. Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan,
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
 8. Badan Pengawas Pemilu Kab. Pesisir Selatan,
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan,
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan,
 11. Pemerintahan Nagari (1 Sampel).
- Untuk penarikan sampel responden, maka Ke-11 (sebelas) lembaga / perangkat daerah tersebut dijadikan sebagai responden dalam survey ini.

B. VARIABEL / SUSUNAN PERTANYAAN

- Kuisisioner digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data tingkat kepuasan lembaga pengguna / pemanfaat data kependudukan. Bentuk kuisisioner sebagaimana terlampir.
- Jawaban dari pertanyaan ini merupakan gambaran dari tingkat kepuasan atas pelayanan pemanfaatan data serta pelayanan data dan dokumen kependudukan.
- Adapun skala penilaian dari jawaban survey kepuasan lembaga / perangkat daerah pengguna / pemanfaat data serta pelayanan data dan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :

SKALA	KRITERIA JAWABAN	SKOR PENILAIAN
1	TIDAK PUAS	6
2	KURANG PUAS	7
3	PUAS	8
4	SANGAT PUAS	9

C. METODE PENGOLAHAN HASIL SURVEY

- Pengolahan hasil survey dengan menggunakan perumusan nilai setiap pertanyaan sesuai dengan skala yang telah ditentukan, dengan penarikan nilai total dan hasil dari tiap-tiap responden sesuai batasan-batasan yang ditentukan (terlampir).

Painan, Desember 2020
Pelaksana Survey,

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SARTONI NURSALIM, S.Kom NIP. 19760519 200604 1 003	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. 
2.	ANTON MAHENDRA AMRA, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	2. 

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA SARTONI NURSALIM, S.Kom NIP. 19760519 200604 1 003	
---	--



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
PAINAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2020**

**PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 713/885/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA (LKj)

Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 713 /885/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021

Tanggal : 22 Maret 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Evaluasi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/577/Kpts/BPT-PS/2020, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020;
5. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/Insp-PS/2021, tanggal 4 Januari 2021;
6. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/383/Kpts/Insp-PS/2021 tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2021;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 709/632/Insp-PS/III/2021, tanggal 5 maret 2021.

Handwritten signature and initials 1

B. Susunan Tim Evaluasi:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Rusdiyanto, S.H., M. Hum. | : Penanggung Jawab |
| 2. Afrijon, S.H. | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Yandri, S.H., M.M. | : Pengendali Teknis |
| 4. Zulfahartati, S.E., M.M. | : Ketua Tim |
| 5. Mamik Supriyati, S.E. | : Anggota |
| 6. Syafridal, S.S.T. | : Anggota |
| 7. Junaidi, S.E. | : Anggota |
| 8. Dian Permana Putra, S.E. | : Anggota |

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Periode yang Dievaluasi

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai 22 Maret 2021.

F. Objek yang Dievaluasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*over all assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

H. Aspek yang Dinilai Dalam Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan berkaitan dengan 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi:

1. Perencanaan Kinerja: Renstra, RKT dan PK;
2. Pengukuran Kinerja: Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja: Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan Evaluasi, Rencana Aksi dan Pemanfaatan Evaluasi;
5. Capaian Kinerja: Capaian Outcome dan Kinerja Lainnya.

I. Keterbatasan Dalam Evaluasi

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian evaluasi LKj sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan LHE Nomor 713/1139/LHE-LKj/Insp-PS/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, terhadap semua rekomendasi evaluator *belum* ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 89,81 (dilihat dari Lembar Kriteria Evaluasi/LKE). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, yang terdiri dari:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Capaian
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	28,63
	1. Perencanaan Strategis	10,00	8,63
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	20,00	20,00
B.	Pengukuran Kinerja	25,00	23,13
	1. Pemenuhan Pengukuran	5,00	5,00
	2. Kualitas Pengukuran	12,50	12,50
	3. Implementasi Pengukuran	7,50	5,63
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	15,00
	1. Pemenuhan Laporan	3,00	3,00
	2. Penyajian Informasi Kinerja	7,50	7,50
	3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,50	4,50
D.	Evaluasi Internal	10,00	10,00
	1. Pemenuhan Evaluasi	2,00	2,00
	2. Kualitas Evaluasi	5,00	5,00
	3. Pemanfaatan Evaluasi	3,00	3,00
E.	Capaian Kinerja	20,00	13,06
	1. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)	15,00	10,56
	2. Kinerja Lainnya	5,00	2,50
Jumlah		100	89,81

Huruf A sampai dengan E menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas perangkat daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan: Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik: Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik: Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6.	C	>30 - 50	Kurang: Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang: Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan minor dan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dari hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapat perolehan nilai hasil evaluasi **89,81** termasuk kategori **A**.

Dapat diinterpretasikan karakteristik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai akuntabilitas kinerja yang **"Memuaskan"** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

Dari hasil evaluasi tersebut diketahui terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 28,63 ;

1. Perencanaan Strategis (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 8,63,
 - a) Pemenuhan Renstra (Bobot 2,00%), dengan Nilai Capaian 2,00, yang perlu diperhatikan adalah:
 - Renstra telah memuat tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) yang disertai target keberhasilannya.
 - Renstra telah memuat sasaran yang telah memuat indikator kinerja sasaran, yang telah memuat target tahunan.
 - Renstra telah menyajikan Indikator kinerja Utama (IKU)
 - Renstra telah dipublikasikan.
 - b) Kualitas Renstra (Bobot 5,00%), dengan Nilai Capaian 4,38%, yang perlu diperhatikan adalah:
 - Tujuan Renstra telah berorientasi hasil, dimana ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.

B. P. 5

- Sasaran Renstra telah berorientasi hasil, dimana indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
 - Target kinerja yang ditetapkan, Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan masih berkisar <90%
- c) Implementasi Renstra (Bobot 3,00%), dengan Nilai Capaian 2,25%, yang perlu diperhatikan adalah:
- Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, tetapi seluruh rekomendasi belum ditindaklanjuti.
 - Renstra telah direviu secara berkala, tetapi hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini.
2. Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 20,00
- a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 4,00%) dengan Nilai Capaian 4,00, yang perlu diperhatikan adalah:
- Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun.
 - Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
 - Perjanjian Kinerja (PK) telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan.
- b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 10,00, yang perlu diperhatikan adalah:
- Sasaran Perencanaan Kinerja Tahunan telah berorientasi hasil, dengan indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dengan target kinerja yang telah ditetapkan dengan baik.
 - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah selaras dengan Renstra, dengan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
 - Rencana Aksi atas kinerja telah ada, dengan mencantumkan target secara periodik atas kinerja, dan telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rincian setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

- c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,00%) dengan Nilai Capaian 6,00, yang perlu diperhatikan adalah:
- Rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
 - Target kinerja yang diperjanjikan telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.
 - Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.
 - Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 23,13 ;

1. Pemenuhan Pengukuran (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 5,00, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
 - b) Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.
 - c) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dipublikasikan.
2. Kualitas Pengukuran (Bobot 12,50%) dengan Nilai Capaian 12,50, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi kriteria indikator yang baik, dan cukup untuk mengukur kinerja, IKU unit kerja telah selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) IP.
 - b) Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan selaras dengan indikator kinerja atasannya.
 - c) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Implementasi Pengukuran (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 5,63, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :

- a) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, dengan target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya.
- b) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
- c) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah direviu secara berkala, tetapi hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 15,00 ;

- 1. Pemenuhan Laporan (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 3,00, hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - a) Laporan Kinerja telah disusun, yang disampaikan tepat waktu.
 - b) Laporan Kinerja telah di upload kedalam website, dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU).
- 2. Penyajian Informasi Kinerja (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 7,50, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, yang telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.
 - b) Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
 - c) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- 3. Pemanfaatan Informasi Kinerja (Bobot 4,50%) dengan Nilai Capaian 4,50, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan.
 - b) Informasi yang disajikan telah dipergunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan dipergunakan untuk penilaian kinerja.



D. Evaluasi Internal (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 10,00 ;

1. Pemenuhan Evaluasi (Bobot 2,00%) dengan Nilai Capaian 2,00, hal yang perlu menjadi perhatian adalah:
 - a) Telah terdapat pedoman/SOP evaluasi kinerja internal organisasi.
 - b) Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
2. Kualitas Evaluasi (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 5,00, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten, yang disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.
 - b) Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, dan telah menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 3,00, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
 - b) Kualitas implementasi siklus SKPD telah mengalami peningkatan.
 - c) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

E. Capaian Kinerja (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 13,06 ;

1. Kinerja yang dilaporkan/Outcome, (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 10,56, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Target dapat dicapai, dengan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
 - b) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.
2. Kinerja Lainnya (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 2,50, hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a) Inovasi dalam manajemen kinerja belum terkait dengan pemberian insentif

- b) Terdapat penghargaan Tingkat Nasional pada Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan layanan terbaik dan terluas dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Rakornas di Makasar 2019.

III.REKOMENDASI

Atas hasil evaluasi atas LKj yang dilakukan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 28,63 ;

1. Perencanaan Strategis (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 8,63,
 - a) Pemenuhan Renstra (Bobot 2,00%), dengan Nilai Capaian 2,00, yang perlu disempurnakan adalah:
 - Agar mempertahankan Renstra tetap memuat tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan disertai target keberhasilannya.
 - Agar mempertahankan Renstra tetap memuat sasaran yang memuat indikator kinerja sasaran, dan memuat target tahunan.
 - Agar mempertahankan Renstra tetap menyajikan Indikator kinerja Utama (IKU)
 - Agar Renstra selalu dipublikasikan.
 - b) Kualitas Renstra (Bobot 5,00%), dengan Nilai Capaian 4,38%, yang perlu disempurnakan adalah:
 - Agar tujuan Renstra tetap berorientasi hasil, dimana ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) tetap memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
 - Agar Sasaran Renstra tetap berorientasi hasil, dimana indikator kinerja sasaran (outcome dan output) tetap memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
 - Agar target kinerja yang ditetapkan, Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan lebih disempurnakan dengan berkisar >90%.

- c) Implementasi Renstra (Bobot 3,00%), dengan Nilai Capaian 2,25%, yang perlu disempurnakan adalah:
- Agar target jangka menengah dalam Renstra terus dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.
 - Agar Renstra tetap direviu secara berkala, dengan hasil yang lebih baik dari sebelumnya (adanya inovasi).

3. Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 20,00

- a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 4,00%) dengan Nilai Capaian 4,00, yang perlu disempurnakan adalah:
- Agar Dokumen perencanaan kinerja tahunan tetap disusun.
 - Agar Perjanjian Kinerja (PK) tetap disusun
 - Agar Perjanjian Kinerja (PK) tetap menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - Agar Perjanjian Kinerja (PK) tetap dipublikasikan tiap tahunnya.
- b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 10,00, yang perlu disempurnakan adalah:
- Agar Sasaran Perencanaan Kinerja Tahunan tetap berorientasi hasil, dengan indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dengan target kinerja ditetapkan dengan baik.
 - Agar Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tetap selaras dengan Renstra, dengan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
 - Agar Rencana Aksi atas kinerja tetap ada, dengan mencantumkan target secara periodik atas kinerja, dan mencantumkan sub kegiatan/komponen rincian setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,00%) dengan Nilai Capaian 6,00, yang perlu disempurnakan adalah:
- Agar Rencana kinerja tahunan tetap dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

- Agar Target kinerja yang diperjanjikan tetap dipergunakan untuk mengukur keberhasilan.
- Agar Rencana Aksi atas Kinerja tetap dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- Agar Perjanjian Kinerja tetap dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 23,13 ;

1. Pemenuhan Pengukuran (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 5,00, hal yang perlu disempurnakan adalah :
 - a) Agar Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi ukuran kinerja secara formal.
 - b) Agar ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV selalu menjadi turunan kinerja atasannya.
 - c) Agar selalu ada mekanisme pengumpulan data kinerja.
 - d) Agar Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap dipublikasikan tiap tahun.
2. Kualitas Pengukuran (Bobot 12,50%) dengan Nilai Capaian 12,50, hal yang perlu disempurnakan adalah :
 - a) Agar Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap memenuhi kriteria indikator yang baik, dan cukup untuk mengukur kinerja, IKU unit kerja tetap selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) IP.
 - b) Agar Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV tetap memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan selaras dengan indikator kinerja atasannya.
 - c) Agar Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Implementasi Pengukuran (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 5,63 hal yang perlu disempurnakan adalah :
 - a) Agar Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, dengan target kinerja eselon III dan IV terus dimonitor pencapaiannya.

- b) Agar Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
- c) Agar Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap direviu secara berkala, dengan menunjukan hasil yang lebih baik (ada inovatif).

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 15,00 ;

1. Pemenuhan Laporan (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 3,00, hal yang perlu disempurnakan adalah:
 - a) Agar Laporan Kinerja tetap disusun, dan disampaikan tepat waktu.
 - b) Agar Laporan Kinerja tetap di upload kedalam website, dan menyajikan informasi mengenai pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penyajian Informasi Kinerja (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 7,50, hal yang perlu disempurnakan adalah :
 - a) Agar Laporan Kinerja tetap menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, dengan menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.
 - b) Agar Laporan Kinerja tetap menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
 - c) Agar Laporan Kinerja tetap menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja (Bobot 4,50%) dengan Nilai Capaian 4,50, hal yang perlu disempurnakan adalah :
 - a) Agar Informasi yang disajikan tetap digunakan dalam perbaikan perencanaan.
 - b) Agar Informasi yang disajikan tetap dipergunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan dipergunakan untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 10,00 ;

1. Pemenuhan Evaluasi (Bobot 2,00%) dengan Nilai Capaian 2,00, hal yang perlu disempurnakan adalah:
 - a) Agar pedoman/SOP selalu ada guna evaluasi kinerja internal organisasi.

- b) Agar tetap ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
2. Kualitas Evaluasi (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 5,00, hal yang perlu disempurnakan adalah :
- a) Agar Evaluasi akuntabilitas kinerja tetap dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten, yang disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.
 - b) Agar Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, dengan terus menunjukan perbaikan setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 3,00, hal yang perlu disempurnakan adalah :
- a) Agar Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tetap ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
 - b) Agar Kualitas implementasi sapip SKPD dapat meningkat dari tahun ke tahun.
 - c) Agar Hasil evaluasi program tetap ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

E. Capaian Kinerja (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 13,06 ;

1. Kinerja yang dilaporkan/Outcome, (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 10,56, hal yang perlu disempurnakan adalah :
- a) Agar target dapat dicapai, dengan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
 - b) Agar Informasi mengenai kinerja tetap dapat diandalkan.
2. Kinerja Lainnya (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 2,50, hal yang perlu disempurnakan adalah :
- a) Agar Inovasi dalam manajemen kinerja terkait dengan pemberian insentif
 - b) Agar di Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kembali memperoleh penghargaan Tingkat Nasional.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambat 1 (satu) bulan sesudah Laporan ini diterima, terima kasih

Painan, 22 Maret 2021



INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN**

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EVAFAUZA YULIASMAN,SE.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HENDRAJONI,SH,M.H
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Desember 2020

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

H. HENDRAJONI,S.H.,M.H.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

**PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,7%	93,7%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	9	9
		2. Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	75.0%	75,0%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 379.625.639	222.076.696
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 296.614.000	179.129.850
3.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 3.969.864.000	3.236.152.354
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 84.400.000	86.241.800
Jumlah		Rp. 4.730.503.639	3.723.600.700

Painan, 21 Desember 2020

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESISIR SELATAN**



H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001